

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Mutu Pendidikan

1. Pengertian Mutu Pendidikan

Mutu berasal dari bahasa Latin yaitu *qualis* yang artinya *what kind of*. Menurut Deming mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar. Mutu menurut Juran ialah kecocokan dengan produk. Mutu menurut Crosby ialah kesesuaian dengan yang diisyaratkan. West Burnham mengatakan mutu adalah ukuran relatif suatu produk atau jasa sesuai dengan standar mutu desain. Mutu desain meliputi spesifikasi produk atau mutu kesesuaian, yaitu seberapa jauh suatu produk telah memenuhi persyaratan atau spesifikasi mutu yang ditetapkan.¹

Mutu merupakan kemampuan (*ability*) yang dimiliki oleh suatu produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan atau harapan dan kepuasan pelanggan, dalam pendidikan yang dimaksud dengan pelanggan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu internal customer (siswa atau mahasiswa sebagai pembelajar sekaligus input) dan eksternal customer (masyarakat dan dunia industri).²

Nomi Pfeffer dan Anna Coote, berdiskusi tentang mutu dalam jasa

¹ Husaini Usman, *Manajemen Teori praktik & Riset Pendidikan* (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), 477.

² Nanang Fatah, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013),2.

kesejahteraan, bahwa, “Mutu merupakan konsep yang licin”.³ Mutu dapat dipandang sebagai sebuah konsep yang absolut sekaligus relatif. Mutu dalam percakapan sehari-hari sebagian besar dipahami sebagai sesuatu yang absolut, misalnya restoran yang mahal dan mobil-mobil yang mewah. Sebagai suatu konsep yang absolut, mutu sama halnya dengan sifat baik, cantik, dan benar, merupakan suatu idealisme yang tidak dapat dikompromikan.⁴

Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam” proses pendidikan” yang bermutu terlibat berbagai input seperti bahan ajar (kognitif, afektif, atau psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana sekolah, dukungan administrasi sarana prasarana, sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Mutu dalam konteks “hasil pendidikan” mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu (apakah tiap akhir semester, akhir tahun, 2 tahun atau 5 tahun, bahkan 10 tahun). Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan (*student achievement*) dapat berupa hasil tes kemampuan akademis (misalnya tes formatif, sumatif, dan UN). Dapat pula prestasi di bidang lain, seperti prestasi di suatu cabang olahraga, seni, atau ketrampilan tambahan tertentu, misalnya: komputer, beragama jenis teknik, jasa. Bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (intangible), seperti suasana, disiplin, keakraban, saling menghormati,

³ Edward Sallis, *Total Quality Managemen in Education: Managemen Mutu Pendidikan* (Jogjakarta: IRCisod, 2008), 50.

⁴ *Ibid.*, 51-52

kebersihan, toleransi, emosional, dan sebagainya.⁵

Antara proses dan hasil pendidikan yang bermutu saling berhubungan. Akan tetapi, agar proses yang baik itu tidak salah arah, maka mutu dalam artian hasil (output) harus dirumuskan lebih dahulu oleh sekolah, dan harus jelas target yang akan dicapai untuk setiap tahun atau kurun waktu lainnya. Berbagai input dan proses harus selalu mengacu pada mutu-hasil (output) yang ingin dicapai.⁶

Secara substansi, mutu pendidikan diterjemahkan sebagai suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk atau *output*, jasa/pelayanan, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Kriteria untuk menentukan mutu pendidikan mesti dilihat dari 5 aspek, yakni *output*, pelayanan, sumber daya manusia (guru), aspek proses dan aspek lingkungan.⁷

Mutu pendidikan adalah hasil belajar, yang menyangkut prestasi belajar mengajar yang dicapai siswa baik yang berhubungan dengan pengetahuan, sikap atau perilaku setelah mempelajari pendidikan agama Islam dalam kurun waktu tertentu/semester yang dinyatakan dalam bentuk nilai rapotr/semester.⁸

Adapun menurut Sudarwan Danim, mutu pendidikan mengacu pada masukan, proses, luaran, dan dampaknya. Mutu masukan dapat dilihat dari beberapa sisi. Pertama, kondisi baik atau tidaknya masukan sumber daya manusia, seperti kepala sekolah, guru, staf tata usaha, dan siswa. Kedua, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan material berupa alat peraga, buku-

⁵ Husaini Usman, *Manajemen Teori praktik & Riset Pendidikan* .555.

⁶ *Ibid.*,.555.

⁷ UmbuTagela Ibi Leba & Sumardjono Pandmomartono. *Profesi Pendidikan*. (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014),160.

⁸ Choirun Fuad Yusuf, *Budaya Sekolah & Mutu Pendidikan* (Jakarta Selatan PT. Pena Citasari, 2008), 22

buku, kurikulum, prasarana, sarana sekolah, dan lain-lain. Ketiga, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan yang perangkat lunak, seperti peraturan, struktur organisasi, dan deskripsi kerja. Keempat, mutu masukan yang bersifat harapan dan kebutuhan, seperti visi, motivasi, ketekunan, dan cita-cita.

Mutu proses pembelajaran mengandung makna bahwa kemampuan sumber daya sekolah mentransformasikan beragam jenis masukan dan situasi untuk mencapai derajat nilai tambah tertentu dari peserta didik. Apabila dilihat dari hasil pendidikan, mutu pendidikan dipandang bermutu jika mampu melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu.⁹

Dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan adalah derajat keunggulan dalam pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien untuk melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu.

2. Tujuan dan Manfaat Mutu Pendidikan

Mutu sangat bermanfaat bagi dunia pendidikan yaitu:

- a. Meningkatkan pertanggung jawaban (*akuntabilitas*) sekolah kepada masyarakat dan atau pemerintah yang telah memberikan semua biaya kepada sekolah.

⁹ Sri Minarti, *Managemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri* (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2016), 329-330.

- b. Menjamin mutu lulusannya
- c. Bekerja lebih profesional
- d. Meningkatkan persaingan yang sehat.
- e. Secara umum tujuan dari penjaminan mutu pendidikan adalah untuk merencanakan, mencapai, memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan pada satuan pendidikan tertentu.¹⁰

Dalam Permendiknas No 63 Tahun 2009 Pasal 2 menyatakan bahwa tujuan akhir dari penjaminan mutu pendidikan adalah tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana dicita-citakan oleh Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dicapai melalui penerapan SPMP.

3. Indikator Mutu Pendidikan

Indikator atau kriteria yang dapat dijadikan tolak ukur mutu pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Hasil akhir pendidikan (*Ultimate Outcome*)
- b. Hasil langsung pendidikan (*Immediate Outcome*)

hasil langsung inilah yang dipakai sebagai titik tolak ukur mutu pendidikan suatu lembaga pendidikan. Misalnya melalui: tes tulis, daftar cek, anektor, skala rating, dan skala sikap.

¹⁰ Husaini Usman, *Manajemen Teori praktik & Riset Pendidikan*,.560.

c. Proses pendidikan

Proses pendidikan dianggap menentukan hasil langsung maupun hasil akhir pendidikan.

d. Instrumen input

yaitu alat berinteraksi dengan raw input (siswa)

e. *Raw input* dan lingkungan.¹¹

Indikator terkait mutu pendidikan Islam diantaranya sebagai berikut: Pertama, mutu pendidikan Islam dapat dilihat dari hasil akhir pendidikan yang merupakan esensi semua usaha dalam pendidikan Islam. Yang menjadi ukuran biasanya tingkah laku para lulusan suatu lembaga pendidikan setelah mereka terjun dalam masyarakat atau dalam kompetisi dunia kerja. Dengan kata lain, taraf mutu pendidikan Islam di berbagai level pendidikannya (MI/MTs/MA/PTAI) digambarkan oleh seberapa jauh tingkah laku para lulusannya memenuhi tuntutan masyarakat atau dunia kerja seperti yang lazimnya tercantum dalam tujuan umum pendidikan.

Kedua, cara lain untuk melihat mutu pendidikan Islam ialah dengan cara mengukur hasil langsung pendidikannya. Hasil itu biasanya berupa tingkah laku anak didik (berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikapnya) setelah mereka menyelesaikan pendidikannya.

Ketiga, gambaran mutu pendidikan Islam dapat dilihat juga dari proses

¹¹ Sri Minarti, *Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri* (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2016), 335-336.

pendidikannya sebab proses pendidikan dianggap menentukan hasil langsung maupun hasil akhir pendidikan. Faktor-faktor proses pendidikan yang akan dijadikan ukuran mutu pendidikan Islam haruslah benar-benar ada hubungan dengan hasil pendidikan, baik secara teoritik maupun empirik. Ukuran yang dipakai disini adalah hasil kuantifikasi kuantitas maupun kualitas faktor-faktor poses pendidikan yang dikumpulkan dengan alat-alat ukur seperti daftar observasi, kuesioner dan wawancara.¹²

4. Karakteristik Mutu

Mutu memiliki 13 karakter sebagai berikut:

- a. Kinerja (perform) : berkaitan dengan aspek sekolah Misalnya : kinerja guru dalam mengajar baik, memberikan penjelasan yang meyakinkan, sehat dan rajin mengajar, dan menyiapkan bahan pelajaran dengan lengkap. Pelayanan administrasi sekolah baik yang ditandai hasil belajar tinggi, lulusannya banyak, dan lulus tepat waktu. Akibat kinerja sekolah yang baik sekolah tersebut menjadi sekolah yang favorit.
- b. Waktu Ajar (*timeliness*): selesai dengan waktu yang wajar, Misalnya: memulai dan mengakhiri pelajaran tepat waktu.
- c. Handal (*reability*): usai pelayanan prima bertahan lama. Misalnya: pelayanan prima yang diberikan sekolah bertahan dari tahun ketahun.

¹² Muhammad Thoyib, *Managemen Mutu Pendidikan Islam Kontemporer, Teori, Fakta dan Aksi Mutu Pendidikan Islam dalam Konteks Internasionalisasi Pendidikan Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), 22-23

- d. Daya Tahan (*durability*): tahan banting. Misalnya: meskipun krisis moneter sekolah masih tetap bertahan, tidak tutup.
- e. Indah. Misalnya: eksterior dan interior sekolah ditata menarik. Taman sekolah ditanami bunga dan terpelihara dengan baik.
- f. Hubungan Manusiawi (*personal interface*): menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan profesionalisme. Misalnya: warga sekolah saling menghormati, baik warga intern maupun ekstern sekolah, demokratis dan menghargai profesionalisme.
- g. Mudah Penggunaannya (*easy of use*): sarana dan prasarana. Misalnya: aturan-aturan sekolah mudah diterapkan. Buku-buku perpustakaan mudah dipinjam dan dikembalikan tepat waktu. Penjelasan guru di kelas mudah di mengerti siswa.
- h. Bentuk Khusus (*feature*): keunggulan tertentu. Misalnya: sekolah ada yang unggul dengan hampir lulusannya di universitas bermutu. Unggul dengan bahasa inggrisnya. Unggul dalam penguasaan teknologi informasinya. Selain itu unggul dalam karya ilmiah kesenian atau olahraga.
- i. Standar Tertentu (*conformance to specification*): memenuhi syarat tertentu. Misalnya: sekolah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), sekolah sudah memenuhi standar minimal ujian nasional atau sekolah sudah memenuhi ISO 9001: 2000 atau sekolah sudah memenuhi TOEFL dengan skor 650.

- j. Konsistensi: stabil. Misalnya: mutu sekolah dari dulu sampai sekarang tidak menurun seperti harus mengontrol nilai siswa-siswanya. Warga sekolah konsisten antara perkataan dan perbuatan.
- k. Seragam (*uniformity*): tanpa variasi, tidak tercampur. Misalnya: sekolah menyeragamkan pakaian sekolah dan pakaian dinas.
- l. Mampu Melayani: mampu memberikan pelayanan prima. Misalnya: sekolah menyediakan kotak saran dan saran-saran yang masuk mampu dipenuhi sebaik-baiknya. Sekolah mampu memberikan pelayanan primanya kepada pelanggan sekolah sehingga semua pelanggan puas.
- m. Ketepatan (*accuracy*): ketepatan dalam pelayanan. Misalnya: sekolah mampu memberikan pelayanan sesuai dengan yang diinginkan pelanggan sekolah. Semua warga sekolah bekerja dengan teliti. Jam belajar di sekolah berlangsung tepat waktu.¹³

B. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

1. Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan adalah bentuk dari pertanggung jawaban lembaga pendidikan terhadap hak-hak *stakeholder* yang ada didalamnya seperti pendidik, peserta didik, dan orang tua wali. Kegiatan penjaminan mutu pendidikan harus dilakukan secara terpadu antara pemangku kepentingan dan pembina pendidikan di semua tingkatan pendidikan, sebagaimana yang telah diatur

¹³ Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktek, dan Riset Pendidikan*,. 411.

dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.¹⁴

Untuk dapat menerapkan penjaminan mutu pendidikan dengan baik, satuan pendidikan harus membentuk Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Sesuai dengan Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah menjelaskan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah pengelolaan pada satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah, antara lain: kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas.¹⁵ Sedangkan petunjuk pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan menjelaskan bahwa SPMI adalah sistem penjaminan mutu yang dijalankan oleh seluruh komponen didalam lembaga pendidikan. SPMI mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP).¹⁶

Jadi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan dalam mengelola satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah secara mandiri dan terus-menerus untuk menjamin pendidikan bermutu yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

2. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Menurut Eulau dan Prewitt yang dikutip oleh Jones, kebijakan adalah

¹⁴ Hanun Asrohah, *Manajemen Mutu Pendidikan*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 106

¹⁵ *Ibid*, 107.

¹⁶ Petunjuk pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan oleh satuan pendidikan, 4.

keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk dilakukan oleh masyarakat agar program-program pemerintah mencapai tujuan. Kebijakan juga diterapkan dalam bidang pendidikan yang diaplikasikan pada lembaga pendidikan. Kebijakan pendidikan adalah suatu tindakan yang diambil seseorang dengan kesepakatan bersama untuk diterapkan pada satuan pendidikan sebagai upaya mengatasi masalah dalam pendidikan agar tercapainya tujuan pendidikan.¹⁷

Kebijakan dalam pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah tidak hanya mengatur urusan kurikulum, pedagogi dan penilaiannya, tetapi juga kondisi guru dan pemeliharaan sarana prasarana. Kebijakan dalam pendidikan berfungsi antara lain: menyediakan akuntabilitas norma budaya yang menurut pemerintah perlu ada dalam pendidikan dan melembagakan mekanisme akuntabilitas untuk mengukur kinerja siswa dan guru.¹⁸

Konsep pendidikan dalam sistem penjaminan mutu pendidikan belum mendapat perhatian yang mendalam dari pemerintah. Menurut Hanief Saha Ghofur, kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan sebelum dan sesudah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Nomor 2 Tahun 1989, bahwasannya mutu masih menerapkan konsep yang bersifat partikural dan belum mengacu pada sistem penjaminan mutu yang terperinci. Baru dalam UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 dan PP Nomor 19 tahun 2005, pemahaman terhadap sistem penjaminan mutu telah terperinci dan terintegrasi, baik pembahasan tentang

¹⁷ H.M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan* (dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia), (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 38.

¹⁸ Nanang Fattah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2014), 132

penjaminan mutu internal maupun penjaminan mutu eksternal.¹⁹

Menurut Hanief, gagalnya kebijakan mutu pendidikan Indonesia bisa di atasi dengan menerapkan sistem penjaminan mutu terpadu (total quality assurance sistem). Sistem penjaminan mutu terpadu akan mudah dilaksanakan, jika didukung oleh manajemen lembaga pendidikan yang bersifat mandiri, karena pada lembaga pendidikan yang mandiri dapat menganalisis kebutuhannya sendiri untuk memenuhi kepuasan pelanggan dan stakeholder di dalamnya.²⁰

Untuk melindungi masyarakat dalam mendapatkan hak-hak atas kinerja mereka dalam memenuhi mutu pendidikan, pemerintah menetapkan kebijakan penjaminan mutu internal. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 menetapkan, setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Sebuah lembaga harus memiliki statemen kebijakan yang jelas mengenai mutu. Kebijakan mutu adalah sebuah statemen komitmen yang dilakukan lembaga. Hal tersebut akan sangat bermanfaat bagi lembaga jika mereka menarik sebuah aturan tentang kebijakan mutu, karena hal tersebut merupakan metode praktis agar lembaga mampu menerapkan standar mutunya sendiri.²¹

Pada tahun 2016, pemerintah dibantu oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) mengulirkan penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang dicantumkan pada Peraturan Menteri

¹⁹ Hanief Saha Ghafur, *Manajemen Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi di Indonesia: Suatu Analisis Kebijakan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 84

²⁰ *Ibid.*, 89.

²¹ Edward Sallis, *Total Quality Management in Educatian Manajemen Mutu Pendidikan*, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2007), 230.

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016. Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri dari dua komponen yaitu sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) dan sistem penjaminan mutu internal (SPMI).²²

SPME adalah sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan stakeholder yang berada diluar lembaga seperti halnya pemerintah, pemerintah daerah, lembaga akreditasi dan lembaga standarisasi pendidikan.²³ Sedangkan SPMI adalah pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang menerapkan sistem manajemen berbasis sekolah: kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.²⁴

Penjaminan mutu dijalankan oleh seluruh komponen yang ada pada satuan pendidikan. Kegiatan penjaminan mutu internal harus dievaluasi, dikembangkan dan ditetapkan secara berkelanjutan oleh satuan pendidikan kemudian dituangkan dalam pedoman pengelolaan satuan pendidikan serta disosialisasikan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan.

3. Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Internal

Ada beberapa prinsip sistem penjaminan mutu internal antara lain²⁵ :

- a. Mandiri: SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara mandiri oleh satuan pendidikan.

²² Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016.

²³ Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan oleh Satuan Pendidikan, hal. 4.

²⁴ Hanun Asrohah, *Manajemen Mutu Pendidikan*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 106.

²⁵ Pedoman Umum Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, 27-28

- b. Terstandar: SPMI menggunakan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan oleh Permendikbud dan Standar yang ditetapkan oleh satuan pendidikan bagi satuan pendidikan yang telah memenuhi SNP.
- c. Akurat: SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat.
- d. Sistemik dan Berkelanjutan: SPMI diimplementasikan dengan menggunakan lima langkah penjaminan mutu yaitu pemetaan mutu, penyusunan rencana peningkatan mutu, pelaksanaan pemenuhan mutu, audit/evaluasi pemenuhan mutu, dan penetapan standar baru yang dilaksanakan secara berkelanjutan membentuk suatu siklus.
- e. Holistik: SPMI dilaksanakan terhadap keseluruhan unsur dalam satuan pendidikan yang meliputi organisasi, kebijakan, dan proses-proses yang terkait.
- f. Terdokumentasi: Seluruh aktivitas dalam melaksanakan SPMI terdokumentasi dengan baik dalam berbagai dokumen mutu.

4. Tujuan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Penerapan sistem penjaminan mutu di satuan pendidikan dasar dan menengah ini bertujuan untuk memastikan bahwa keseluruhan unsur yang meliputi organisasi, kebijakan, dan proses-proses yang terkait dapat berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk menjamin terwujudnya budaya

mutu di satuan pendidikan.²⁶

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 28 Tahun 2018 pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah berfungsi untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan sehingga terwujud pendidikan yang bermutu. Sedangkan ayat (2) menjelaskan bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri.²⁷

5. Prosedur Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016, memiliki dokumen SMPI antara lain:²⁸

a) Kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI adalah dokumen berisi garis besar tentang bagaimana memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan sehingga terwujud budaya mutu pada satuan pendidikan. Dokumen kebijakan SPMI berisi:

1) Visi dan misi lembaga pendidikan

²⁶ Nyoman Sridana, dkk. Sistem penjaminan Mutu Internal di Satuan Pendidikan Menengah (SMA), *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 2018, (1) 1 : 45-51

²⁷ Permendikbud Nomor 28 tahun 2018 Pasal 2, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah

²⁸ Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik - Pendidikan Vokasi Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh, 27-31.

2) Latar belakang dan tujuan SPMI

3) Garis besar kebijakan SPMI antara lain:

Asas dan prinsip SPMI satuan pendidikan

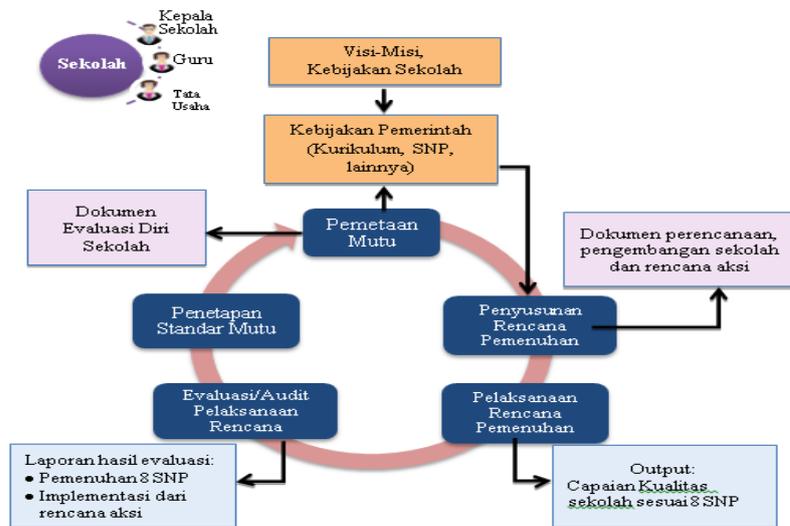
- b. Tujuan dan strategi SPMI satuan pendidikan
- c. Ruang lingkup SMPI satuan pendidikan
- d. Manajemen SPMI satuan pendidikan
- e. Pengorganisasian SPMI satuan pendidikan (lembaga yang terintegrasi dalam manajemen)
- f. Jumlah dan nama standar SPMI

6. Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Sistem penjaminan mutu internal merupakan suatu siklus yang terpadu dan sistematis yang dilaksanakan secara berkelanjutan dalam menjamin peningkatan mutu pendidikan serta terbangunnya budaya mutu pada lembaga pendidikan.²⁹ Dalam menjalankan penjaminan mutu internal harus ada kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan sekolah. Berdasarkan metode penjaminan mutu, siklus penjaminan mutu internal pada satuan pendidikan dapat dilihat pada gambar 2.1. dibawah ini³⁰ :

²⁹ Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan oleh Satuan Pendidikan, 8

³⁰ *Ibid.*,



Gambar 2.1. Siklus Penjaminan Mutu Internal

Sesuai dengan siklus yang terlihat pada gambar 2.1. ada lima siklus sistem penjaminan mutu pendidikan antara lain³¹ :

a. Pemetaan mutu pendidikan di satuan pendidikan.

Pemetaan mutu pendidikan menggunakan dokumen evaluasi diri yang didalamnya termasuk instrumen evaluasi diri dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan (SNP). Hasil pemetaan mutu selanjutnya dijadikan acuan didalam menetapkan visi misi dan kebijakan sekolah dalam melakukan peningkatan mutu pendidikan.

b. Penyusunan rencana peningkatan mutu

Perencanaan peningkatan mutu pendidikan dituangkan dalam dokumen perencanaan, pengembangan sekolah dan rencana aksi. Pembuatan

³¹ *Ibid*, 12

rencana sekolah terkait dengan peningkatan mutu harus disusun berdasarkan potret diri sekolah dari kondisi mutu saat evaluasi diri dilakukan, kemudian menyusun sejumlah rencana kerja yang secara keseluruhan berorientasi pada peningkatan mutu proses administrasi dan pembelajaran.

c. Pelaksanaan rencana peningkatan mutu.

Pemenuhan mutu akan memadu anggota dalam menerapkan proses pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan lain yang berkaitan dengan program penjaminan mutu internal.³²

d. Evaluasi atau Audit pelaksanaan rencana peningkatan mutu.

Evaluasi atau audit dilakukan secara internal untuk memastikan bahwa pelaksanaan peningkatan mutu berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Alat untuk mengukur standar mutu pada satuan pendidikan yakni dengan menggunakan instrumen Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah (EDS/M). Setiap satuan pendidikan melakukan penjarangan data dengan cara mengisi instrumen evaluasi diri. Pengukuran kinerja melalui pengukuran evaluasi diri sekolah dilakukan satu tahun sekali.³³

e. Menerapkan standar mutu baru

Setelah semua kegiatan dievaluasi, maka langkah selanjutnya yakni penerapan standar mutu dan penyusunan strategi peningkatan mutu

³² Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan oleh Satuan Pendidikan, 35-36.

³³ Nanang Fattah, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 28-29

berdasarkan hasil evaluasi.³⁴

Dengan demikian penerapan sistem penjaminan mutu bukanlah hanya ditujukan untuk meningkatkan mutu sesuai pada SNP semata, namun juga mendorong terciptanya budaya mutu pendidikan dimana semua komponen di satuan pendidikan memiliki jiwa pembelajar dan selalu mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan zaman.

f. Hasil Sistem Penjaminan Mutu Internal

Seluruh proses dalam siklus sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di satuan pendidikan, akan menghasilkan Rapor Hasil Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal, seperti pada gambar 2.2 sebagai berikut³⁵

:



Gambar 2.2 Hasil Implementasi

Sistem Penjaminan Mutu Internal Sebagaimana yang terlihat pada gambar 2. Hasil dari sistem penjaminan mutu internal adalah terjadinya

³⁴ Nyoman Sridana Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 2018, (1) 1: 45-51.

³⁵ Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan oleh Satuan Pendidikan.

peningkatan mutu pendidikan pada level sekolah dari waktu ke waktu. Skor tersebut adalah implementasi sistem penjaminan mutu setiap satuan pendidikan yang ditunjukkan oleh peningkatan skor dari setiap standar setiap kali dilakukan penelitian. Namun demikian, dalam upaya peningkatan mutu pendidikan disekolah tidak harus dipaksakan menaikkan skor seluruh 8 standar pada periode yang sama.

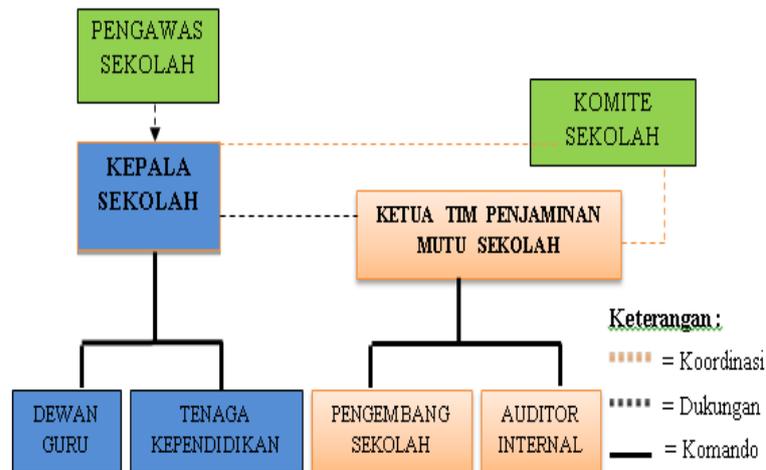
7. Organisasi Sistem Penjaminan Mutu internal

Sistem penjaminan mutu internal dapat berjalan dengan baik, jika di dalam lembaga tersebut mempunyai manajemen penjaminan mutu yang berjalan secara efektif yang disebut tim penjaminan mutu pendidikan. Tim Penjaminan Mutu bersifat independen yang terdiri dari unsur manajemen, kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan yang berkontribusi di satuan pendidikan.

Tim penjaminan mutu dalam struktur organisasi dapat dibentuk secara khusus oleh lembaga pendidikan yang bertugas untuk melakukan audit mutu serta membuat usulan tindakan korektif. Struktur organisasi sistem penjaminan mutu internal dapat bervariasi, tergantung pada jumlah guru dan struktur organisasi yang ada pada masing-masing lembaga.³⁶ Adapun struktur organisasi pada sistem penjaminan mutu pendidikan dapat dilihat pada gambar 2.4 berikut ini³⁷ :

³⁶ *Ibid.*, 162.

³⁷ Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan oleh Satuan Pendidikan



Gambar 2.3. Struktur Organisasi Tim Penjaminan Mutu Internal

Sebagaimana yang dapat dilihat pada bagan di atas, jika sumber daya tidak mencukupi, fungsi penjaminan mutu ini menjadi tugas dari manajemen sekolah yang ada. Pembagian tugas dan penjaminan mutu internal adalah sebagai berikut³⁸ :

a. Lembaga Pendidikan

- 1) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI
- 2) Menyusun dokumen SPMI
- 3) Membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam Rencana Kerja Sekolah
- 4) Melaksanakan pemenuhan mutu baik dalam pengelolaan satuan pendidikan maupun proses pembelajaran

³⁸ Pedoman Umum Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, 35-38

- 5) Menetapkan standar baru dan menyusun strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi
- 6) Membentuk unit penjaminan mutu pada satuan pendidikan
- 7) Mengelola data mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan.

b. Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Lembaga Pendidikan

Program-program dalam rencana pengembangan lembaga pendidikan belum secara jelas terkait dengan program mutu dari sistem penjaminan mutu internal. Hal tersebut disebabkan oleh pihak sekolah yang belum memiliki sistem penjaminan mutu internal secara baik dan berkelanjutan.³⁹ Tugas tim penjaminan mutu pendidikan antara lain:

- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu di tingkatan satuan pendidikan
- 2) Melakukan pembinaan, bimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap pemangku pendidikan dalam mengembangkan penjaminan mutu pendidikan
- 3) Melaksanakan pemetaan mutu pendidikan berdasarkan data mutu pendidikan.
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan

³⁹ D. Setiadi, dkk. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan dan Pengetahuan Indonesia dengan tema “*peningkatan Profesionalisme Pendidik di Era Revolusi Industri 4,0*”. Pendopo Gubernur NTB 27 Oktober 2018, ISSN 2598-1978.

- 5) Memberikan rekomendasi strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi

Tim penjaminan mutu internal diperlukan agar pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan lebih fokus dan efektif. Kepala sekolah memiliki tanggung jawab penuh terhadap tim penjaminan mutu yang telah dibentuk, yang mengikat seluruh warga sekolah dan memiliki kewenangan dalam penerapan standar, pemenuhan standar, pengendalian dokumen, serta audit internal.⁴⁰

C. Kualitas Lulusan Pendidikan

1. Pengertian Kualitas Lulusan Pendidikan

Kualitas atau mutu adalah sifat dari suatu benda dan jasa. mutu adalah paduan sifat-sifat dari barang atau jasa, dalam hal ini pendidikan disebut dengan tingkat kualitas seseorang yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan atau orang lain, baik kebutuhan yang dinyatakan maupun yang tersirat.

Benda sebagai hasil kegiatan manusia yang secara sadar dilakukan disebut kinerja. Secara prinsip para ahli sepakat bahwa kinerja mengarah pada suatu upaya dalam rangka mencapai “prestasi kerja” yang lebih baik. Menjelaskan bahwa kinerja merupakan kesuksesan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan.⁴¹

Hal ini menjelaskan bahwa kinerja adalah hasil yang dicapai seseorang

⁴⁰ Ridwan Abdullah Sani, dkk. *Penjaminan Mutu Sekolah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), 162

⁴¹ Muhammad as'ad, *Psikologi industri* (Yogyakarta: Liberty, 1995), 47.

menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan, kinerja itulah yang dituntut mutunya, sehingga muncul istilah mutu kinerja manusia. Oleh karena itu maka suatu produk atau jasa sebagai kinerja harus dibuat sedemikian rupa agar dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggannya. Adanya produk atau jasa yang disebut bermutu apabila dapat memenuhi atau bahkan melebihi dari sekedar kebutuhan atau harapan pelanggannya, yang ditandai dengan kepuasan.⁴²

Menurut Edward Sallis, kualitas memang sesuatu yang tarik-menarik antara konsep yang absolut dan relatif. Namun ia menegaskan bahwa kualitas sekarang lebih digunakan sebagai konsep yang absolut. Karena itu, kualitas mempunyai kesamaan arti dengan kebaikan, keindahan, dan kebenaran, atau kesesuaian yang tidak ada kompromi. Standar kualitas itu meliputi dua yaitu kualitas yang didasarkan pada standar produk atau jasa dan kualitas yang didasarkan pada pelanggan.⁴³

Kualitas yang didasarkan pada produk dan jasa, memiliki beberapa kualifikasi sesuai dengan spesifikasi, sesuai dengan maksud dan kegunaannya, tidak salah atau cacat, dan benar pada saat awal dan selamanya. Sementara itu, kualitas yang didasarkan pada pelanggan mempunyai kualifikasi memuaskan pelanggan, melebihi harapan pelanggan, dan mencerahkan pelanggan. Komitmen yang harus dibangun dalam setiap diri pelanggan terhadap kualitas adalah pemahaman bahwa:

⁴² Slamet, *Filosofi Mutu dan Penerapan Prinsip-prinsip Manajemen mutu terpadu*, (Bogor: IPB Bogor, 1999) 8.

⁴³ Ahmad Sulhan, *Manajemen Pendidikan Karakter*, 99.

- a. kualitas merupakan fungsi ke arah program yang berhasil. kurang memperhatikan kualitas maka akan mengalami kegagalan jangka panjang.
- b. perbaikan kualitas menuntut komitmen manajemen sepenuhnya untuk dapat berhasil. komitmen pada kualitas ini harus terus-menerus.
- c. perbaikan kualitas adalah kerja keras, tidak ada jalan pintas atau perbaikan cepat.
- d. perbaikan kualitas menuntut banyak pelatihan.
- e. perbaikan kualitas menuntut keterlibatan semua karyawan secara aktif, dan komitmen mutlak dari manajemen sekolah

Dengan demikian yang dimaksud dengan mutu lulusan adalah kepuasan yang diambil untuk melakukan tindakan selama waktu tertentu agar penyelenggaraan pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien serta menghasilkan kualitas lulusan yang relevan dengan pembangunan.⁴⁴

2. Standar kelulusan

Dalam undang-undang sisdiknas bab 4 tentang standar kompetensi lulusan pasal 25 disebutkan bahwa

- a. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan

⁴⁴ Ahmad Fatah Yasin, *Pengembangan Sumber daya Manusia di Lembaga Pendidikan Islam*, (Malang: UIN MALIKI Press, 2012)20.

- b. Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kompetensi untuk seluruh mata atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah
- c. Kompetensi lulusan untuk mata pelajaran bahasa menekankan pada kemampuan membaca dan menulis yang sesuai dengan jenjang pendidikan
- d. Kompetensi kelulusan sebagaimana ayat 1 dan 2 mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.⁴⁵

Sedangkan menurut peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005, Bab X pasal 27 ayat 1 peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan dasar dan menengah setelah menyelesaikan seluruh program pembelajaran apabila:

- a. Memperoleh minimal nilai baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran, kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok pelajaran estetika, dan kelompok pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan.
- b. Lulus ujian sekolah atau madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Lulus ujian nasional.

Sedangkan menurut Diknas bahwa mutu akademik lulusan merupakan gradasi pencapaian kelulusan dalam tes kemampuan akademik, yang dalam hal ini ujian nasional. ujian nasional adalah salah satu alat untuk meningkatkan mutu pendidikan. dalam Permendiknas nomor 78 tahun 2008 pasal 2

⁴⁵ Undang-undang SISDKNAS Bab V Standar Kompetensi Lulusan pasal 25

menyatakan bahwa Ujian Nasional bertujuan menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi

Dalam untuk UN tahun pelajaran 2008-2009, siswa dinyatakan lulus dari satuan pendidikan terdapat 4 kriteria yaitu

- a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran
- b. memperoleh nilai minimal baik pada akhir untuk seluruh mata pelajaran
- c. ujian sekolah atau madrasah
- d. lulus ujian nasional

Sehingga dapat disimpulkan bahwa salah satu syarat kelulusan peserta didik adalah lulus dari ujian nasional yang merupakan teks akademik. hasil dari ujian nasional tetap menjadi syarat yang menentukan kelulusan dari peserta didik, selain itu juga tes praktik dan tes sikap yang diperlukan untuk menentukan kelulusan peserta didik.

Agar lulusan pendidikan Sesuai dengan standar kelulusan yang telah ditetapkan dan menghasilkan sumber daya manusia yang sesuai harapan. maka perlu dibuat pendidikan terpadu. sistem pendidikan harus memperhatikan seluruh unsur pembentuk sistem yang unggul. Selain itu kurikulum sekolah yang struktur dan terprogram. dan orientasi pada pembentukan syafaqoh Islam, berkepribadian Islam dan menguasai keilmuan.⁴⁶

⁴⁶ Eka Prihatin, *Manajemen Peserta Didik*, (Bandung: Alfabeta, 2011) 154.

3. Peningkatan Kualitas Lulusan

Dalam konteks pendidikan pengertian manajemen peningkatan mutu lulusan meliputi input, proses, dan output pendidikan karena sentralnya pada layanan pendidikan adalah output secara umum dan lulusan secara khusus, Mutu lulusan diri sangat terkait dengan mutu input proses dan output. dari ketiganya tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain

Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. suatu yang dimaksud berupa sumber daya sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses diantaranya adalah siswa (berupa kesiapan dan motivasi belajar), guru (berupa kemampuan profesional, pedagogik, sosial dan kepribadian,) kurikulum (berupa relevansi konten isi kurikulum dan operasional proses pembelajaran), masyarakat (orang tua, pengguna lulusan dan perguruan tinggi), komponen-komponen tersebut yang menjadi fokus perhatian sekolah.

Proses pendidikan merupakan berubahnya input menjadi lebih Bermanfaat. sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses, sedangkan sesuatu dari hasil proses adalah output. dalam pendidikan tingkat sekolah, proses yang dimaksud adalah pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, proses belajar mengajar, dan proses monitoring dan evaluasi.⁴⁷

Manajemen peningkatan mutu lulusan merupakan proses yang

⁴⁷ Khairul Umam, *Perencanaan Strategis dalam upaya peningkatan mutu lulusan di Madrasah Aliyah Negeri Malang 1*, Tesis, Malang: Pascasarjana UIN Malang, 49-51.

melibatkan semua bagian dalam lembaga pendidikan. semua bagian tersebut berhubungan dan tidak dapat dipisahkan, bagian tersebut antara lain siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, stakeholder, dan masyarakat sebagai pengguna lulusan. semua bagian tersebut harus Sinergi untuk menghasilkan mutu lulusan yang unggul.

Peningkatan mutu lulusan kiranya menjadi masalah penting, karena peningkatan mutu diperlukan dalam pengelolaan organisasi pendidikan agar bergerak menuju satu arah. pendidikan yang baik dan bermutu menjadi dasar pengembangan dan kemajuan selanjutnya. oleh karena itu, pengelola lembaga pendidikan Harus merespon berbagai kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat untuk perbaikan mutu lulusan yang mampu bersaing untuk tingkat regional, nasional maupun internasional.

Dalam sebuah lembaga pendidikan harus memiliki standar kualitas lulusan yang diharapkan. Kualitas lulusan tersebut termasuk dalam *output* yang mana merupakan prestasi yang bisa dihasilkan dari proses pembelajaran dan manajemen sekolah. Pada umumnya output dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu output berupa prestasi akademik, misalnya: NEM, lomba karya ilmiah remaja, lomba, bahasa dan ilmu alam, cara-cara berfikir (kritis, kreatif, divergen, nalar, rasional, induktif, deduktif dan ilmiah) dan *output* berupa prestasi non akademik misalnya, keingintahuan yang tinggi, harga diri kejujuran, kerjasama yang baik, rasa kasih sayang yang tinggi terhadap sesama, solidaritas yang tinggi, toleransi, kedisiplinan, kerajinan, prestasi olahraga, kesenian, dan

kepramukaan.⁴⁸ Selain *output*, kualitas lulusan juga mencakup *outcome* yaitu bagaimana nilai tambah atau dampak lulusan tersebut terhadap masyarakat. Dengan demikian lulusan tersebut dapat berguna dan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat sesuai dengan bidangnya.⁴⁹

Di lembaga pendidikan termasuk jenjang pendidikan menengah dalam menentukan kualitas lulusan harus memenuhi SKL (Standar Kompetensi Lulusan) yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan. Tujuan dari SKL ini adalah untuk acuan utama pengembangan standar nasional pendidikan agar terpenuhi dan berkembang menjadi lebih baik.⁵⁰

D. Perencanaan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal

Perencanaan menurut F.E Kast dan Jim Resenzweig adalah kegiatan yang terintegrasi yang bertujuan untuk memaksimalkan efektifitas dari seluruh usaha sebagai suatu sistem sesuai dengan tujuan organisasi.⁵¹ Perencanaan menjadi yang paling penting dalam manajemen, karena dengan adanya sebuah perencanaan akan mempermudah kemungkinan yang akan terjadi. Sehingga akan menjadi lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi⁵² :

⁴⁸ Imam Machali dan Ara Hidayat, *The Handbook of Education*, 369

⁴⁹ Pendi Susanto, *Produktivitas Sekolah, Teori Praktik di Tingkat Satuan Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 171.

⁵⁰ *Ibid.*, 326.

⁵¹ M. Ma'ruf, *Konsep Manajemen Pendidikan Islam dalam Al-Qur'an dan Hadits*. Didaktika Religia. Vol. 3 No.2

⁵² Kementerian Agama, *CORDOVA Al-Qur'an & Terjemah*, (Bandung: Syaamil Quran, 2012), 547

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ

بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam agama islam sangat menganjurkan kepada orang-orang yang beriman untuk selalu merencanakan apa yang akan dilakukan. Terutama dalam perencanaan mutu, mutu tidak terjadi begitu saja, harus direncanakan. Mutu menjadi bagian yang penting dari strategi lembaga, dan harus didekati secara sistematis dengan menggunakan proses perencanaan.

Rencana mutu akan mengantarkan statemen kebijakan mutu pada pelaksanaan mutu. Mutu akan menunjukkan bagaimana proses peningkatan mutu dibuat dan dipertahankan. Rencana mutu juga harus memiliki tujuan- tujuan yang berkaitan dengan mutu dan dengan metode yang digunakan untuk menerjemahkan komitmen ke dalam pelaksanaan. Rencana mutu harus merinci proyek-proyek peningkatan yang akan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan.⁵³ Agar perencanaan mutu tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan, maka satuan pendidikan harus melakukan pemetaan mutu.

⁵³ Edward Sallis, *Total Quality Management in Educatian Manajemen Mutu Pendidikan*, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2007), 211.

Pemetaan mutu dilaksanakan melalui kegiatan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dengan mengacu pada SNP. Pemetaan mutu melibatkan seluruh komponen satuan pendidikan seperti kepala satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, komite, orang tua, peserta didik, pengawas serta pemangku kepentingan di luar satuan pendidikan harus terlibat dalam proses pemetaan mutu pendidikan.⁵⁴

Langkah-langkah yang dapat dilakukan satuan pendidikan dalam melaksanakan pemetaan mutu, yaitu: penyusunan instrumen, pengumpulan data, pengolahan dan analisa data serta penyusunan hasil. Satuan pendidikan menyusun instrumen mencakup seluruh standar beserta indikator dari masing-masing standar. Penyusunan instrumen ini akan membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan proses pemetaan mutu. Dalam menyusun instrumen harus memperhatikan bagaimana sumber data tersebut akan didapatkan, karena prinsip pemetaan mutu dilakukan berdasarkan bukti fisik.

Pengumpulan data bukti dibutuhkan dalam pemetaan mutu. Penentuan ruang lingkup data bukti penting untuk dilakukan karena terlalu banyak informasi akan menyebabkan pemetaan mutu menjadi tidak terkendali, tidak berkelanjutan dan tidak produktif. Tahap pengumpulan data dapat dilakukan satuan pendidikan melalui kegiatan sebagai berikut⁵⁵ :

1. Melakukan sosialisasi cara pengisian alat Evaluasi Diri Satuan pendidikan oleh pengawas dan Kepala Satuan pendidikan kepada civitas satuan pendidikan.
2. Melakukan pengisian EDS dengan standar acuan SPM dan/atau SNP.

⁵⁴ Kementerian pendidikan dan kebudayaan, 2016, 21

⁵⁵ Nanang Fattah, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*,.54.

3. Menelaah hasil pengisian dengan cara diskusi seluruh komponen pada satuan pendidikan yang bersangkutan agar diperoleh data yang akurat.
4. Mengumpulkan hasil pengisian instrumen untuk diolah.

Setelah data bukti terkumpul, satuan pendidikan mengolah dan analisa. Data bukti yang terkumpul menggambarkan kondisi mutu satuan pendidikan terhadap SNP. Dalam analisa data yang dapat dilakukan satuan pendidikan adalah sebagai berikut:

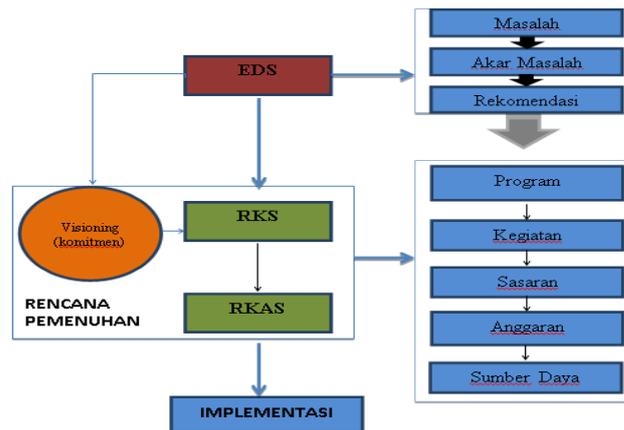
1. Mengecek kebenaran data dilengkapi dengan bukti-bukti kemuakhiran, juga fakta yang ada pada satuan pendidikan.
2. Mengolah data sesuai dengan indikator dan kategori yang terdapat pada EDS.
3. Merangkum data hasil kategorisasi menjadi deskripsi kondisi satuan pendidikan.
4. Menganalisis hasil pengolahan dengan mengacu pada rubrik EDS sehingga diperoleh hasil tentang kedudukan satuan pendidikan sesuai dengan capaian.
5. Hasil analisis berupa ketercapaian standar acuan mutu.

Hasil analisa data bukti menggambarkan peta capaian mutu satuan pendidikan terhadap standar, masalah-masalah yang dihadapi serta rekomendasi perbaikannya. Hasil pemetaan mutu dari EDS sebaiknya disajikan secara singkat namun informatif.⁵⁶

Dari hasil pemetaan yang telah dilakukan, diharapkan mampu menyusun

⁵⁶ Rohmad Shodiq, *Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan di SMK Negeri 1 Magelang* Skripsi, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, 2017. 31.

perencanaan dan mencari solusi dengan cara melakukan upaya yang bersumber dari kekuatan sendiri. Rencana pemenuhan mutu berisikan tanggung jawab untuk pelaksanaannya, dilengkapi dengan kerangka waktu, tenggang waktu dan ukuran keberhasilan. Berikut penyusunan rencana pemenuhan mutu⁵⁷.



Gambar. 2.4 Perencanaan Pemenuhan Mutu

Kegiatan perencanaan pemenuhan mutu dapat diawali dengan pertama membangun visi bersama atau visioning. Kegiatan ini dilakukan untuk membangun komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan mengenai kondisi yang diharapkan pada masa mendatang. Komitmen dibangun dengan melihat kondisi lembaga pendidikan saat ini sesuai hasil EDS dan diselerasikan dengan perkembangan kebijakan pemerintah serta aspirasi warga sekolah.

Kedua, menyempurnakan Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS) yang meliputi:

- a. Arah kebijakan dan program kerja menengah
- b. Strategi dan kegiatan pemenuhan mutu sekolah

⁵⁷ Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan oleh Satuan Pendidikan

- c. Indikator dan sasaran kinerja sekolah
- d. Anggaran
- e. Sumber daya

Penyempurnaan RKJM lembaga pendidikan harus menjamin seluruh permasalahan pada lembaga pendidikan dalam EDS yang sudah diselesaikan.

Ketiga, menjabarkan Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS). Proses yang dilakukan untuk menjabarkan rencana kerja jangka menengah ke dalam rencana kerja dan anggaran tahunan sekolah antara lain:

- a. Pembuatan rencana biaya satuan pendidikan

Rencana biaya program dan kegiatan dilakukan untuk mengetahui berapa biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan apakah satuan pendidikan memiliki dana dan dari mana dana tersebut diperoleh.

- b. Pembuatan rencana pendanaan satuan pendidikan

Rencana pendanaan adalah rencana sumber pendanaan pada satuan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan urutan tingkat kepastian perolehan dana.

- c. Penyesuaian rencana biaya dengan sumber pendanaan

Mempelajari aturan penggunaan sumber pendanaan sesuai dengan aturan pemberi dana. Sumber dana di pertanggungjawabkan sesuai dengan

aturan pemberi dana.

Jadi Evaluasi Diri Sekolah (EDS) adalah komponen penting bagi SPMI dalam meningkatkan mutu dan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) sekolah. Setiap satuan pendidikan harus bertanggung jawab dalam mengevaluasi kemajuan lembaga mereka sendiri melalui EDS dan melakukan upaya untuk menetapkan prioritas peningkatan mutu sekolah. Kegiatan EDS seharusnya dilakukan oleh sekolah, tetapi proses ini juga mensyaratkan adanya keterlibatan dan dukungan dari masyarakat dalam upaya menerapkan transparansi dan validasi proses pendidikan di satuan pendidikan. Satuan pendidikan dapat memenuhi SNP dengan cara menyusun Rencana Kerja Sekolah (RKS). Sasaran akan terukur berdasarkan RKS yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Dari hasil pemetaan dan perencanaan mutu pendidikan yang telah dirancang dengan baik, diharapkan pelaksanaan pemenuhan mutu pada satuan pendidikan dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan.

E. Pelaksanaan Mutu dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pelaksanaan dapat diartikan sebagai upaya untuk mewujudkan segala rencana demi tercapainya tujuan organisasi melalui pemanfaatan, pengerahan, dan pengarahannya semua sumber daya organisasi. Dengan kata lain, pelaksanaan merujuk kepada upaya manajemen untuk memberdayakan semua sumber daya

organisasi secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan organisasi.⁵⁸ Dalam Islam juga menjelaskan mengenai implementasi dalam surat Al-Kahfi ayat 2 yang berbunyi⁵⁹ :

قِيمًا لِّبَيِّنَاتٍ بَاسًا شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَ يُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ

لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا

Artinya: “Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal saleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik.”

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa pada diri Rasulullah tercermin semua ajaran Al-Qur'an dalam bentuk nyata. Beliau adalah pelaksana pertama semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-Nya. Oleh karena itu, para sahabat dimudahkan dalam mengamalkan ajaran Islam yaitu dengan meniru perilaku Rasulullah SAW.⁶⁰

Pelaksanaan mutu pada satuan pendidikan adalah realisasi dari semua kegiatan yang telah dirancang dengan baik dalam perencanaan mutu pada satuan pendidikan. Dalam pelaksanaan mutu pendidikan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan mereka harus mempunyai komitmen yang tinggi dan partisipasi yang luas agar seluruh tujuan yang telah direncanakan agar

⁵⁸ Basilius R. Werang, *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, (Yogyakarta: media akademi, 2015), 5.

⁵⁹ Kementerian Agama, *CORDOVA Al-Qur'an & Terjemah*, (Bandung: Syaamil Quran, 2012), 239.

⁶⁰ M. Ma'ruf, *Konsep Manajemen Pendidikan Islam dalam Al-Qur'an dan Hadits*. Didaktika Religia. Vol. 4 No.29.

dapat tercapai.⁶¹

Pelaksanaan mutu dalam penjaminan mutu internal dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam tahap perencanaan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa keseluruhan unsur yang meliputi organisasi, kebijakan, dan proses-proses yang berkaitan dapat berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk menjamin terwujudnya budaya mutu di satuan pendidikan.⁶² Di sisi lain pelaksanaan mutu bertujuan untuk memenuhi bahkan melampaui SNP dalam rangka memberi kepuasan kepada internal stakeholder seperti peserta didik, dan tenaga kependidikan.⁶³

Pedoman penjaminan mutu (Quality Assurance) pada satuan pendidikan lebih lanjut menyebutkan bahwa pelaksanaan mutu pada satuan pendidikan memerlukan syarat agar dapat mencapai tujuannya yakni komitmen, sikap mental, pengorganisasian, penyamaan visi dan persepsi kepada seluruh komponen pendidikan agar selalu bekerjasama untuk mendukung pencapaian tujuan. Perencanaan terhadap program penjaminan mutu sangat penting untuk mengukur keberhasilan kerja, sehingga apa yang sudah direncanakan dapat terwujud. Pada sisi lain, keberhasilan dalam pelaksanaan mutu juga perlu didukung dengan organisasi tim penjaminan mutu internal yang kuat dengan independensi yang dimiliki untuk melakukan penjaminan mutu internal yang efektif. Organisasi SPMI diharapkan mampu menumbuhkan sikap suportif dari seluruh komponen yang ada pada satuan

⁶¹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

⁶² Pedoman umum sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah.

⁶³ Jonner Simarmata, Analisis Implementasi Penjaminan Mutu di SMA Negeri 3 Kota Jambi, Jurnal Ilmiah Batanghari Jambi Vol.15 No.4 Tahun 2015.

pendidikan tersebut.

Menurut Idris Apandi mengatakan bahwa proses pelaksanaan keberhasilan pelaksanaan mutu antara lain:

1. Sosialisasi pelaksanaan mutu kepada warga sekolah
2. Kepemimpinan kepala sekolah yang kuat
3. Perubahan paradigma warga sekolah
4. Komitmen dari TPMPS dan warga sekolah
5. Berjiwa pembelajar
6. Memahami setiap tahapan pelaksanaan mutu
7. Konsisten dalam pelaksanaan mutu
8. Pembinaan yang optimal dari TPMPD

Menurut Sopiah Jamaluddin dalam jurnal *Desain Sekolah Model tentang Studi Penjaminan Mutu Pendidikan* menyebutkan bahwa dalam keberhasilan pelaksanaan mutu apabila diikuti oleh komitmen bersama antara LPMP, Fasda, Sekolah Model, dan Sekolah Imbas untuk melaksanakan perbaikan mutu secara berkelanjutan.⁶⁴ Dalam hal ini pelaksanaan mutu pendidikan difokuskan pada siswa dan proses pembelajaran di dalamnya serta diikuti dengan komitmen bersama antar pemangku kepentingan lembaga pendidikan.

F. Audit Mutu dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal

⁶⁴ Sopiah Jamaluddin. *Desain Sekolah Model: "Studi Penjaminan Mutu Studi Penjaminan Mutu Pendidikan"* Jurnal Ijer Volume 2 (2) 2017, 105

Audit mutu dalam sistem penjaminan mutu internal dilakukan secara sistematis, mandiri dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit, sehingga dapat menentukan tingkat pemenuhan kriteria audit. Kemudian dari hasil audit tersebut dapat digunakan sebagai proses pengambilan keputusan dan perencanaan. Didalam Al-Qur'an terdapat istilah ayat yang menerangkan tentang audit yang terdapat pada surat Al-Anbiya' ayat 47 yang berbunyi⁶⁵ :

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ

مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَسِيبِينَ

Artinya: “Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikitpun. Dan jika (amalan itu) hanya seberat biji sawipun pasti Kami mendatangkan (pahala)nya. Dan cukuplah Kami sebagai pembuat perhitungan”.

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa, setiap perbuatan akan mendapatkan balasan sesuai apa yang telah dikerjakannya. Seperti halnya dalam kegiatan penjaminan mutu yang menginginkan hasil. Seorang kepala sekolah dan pelaksana kegiatan, berharap agar kegiatan yang sudah direncanakan dan dilaksanakan dapat memperoleh hasil sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Untuk memperoleh hasil yang memuaskan, maka perlu diadakannya audit mutu internal.

Audit mutu internal adalah pengujian secara sistematis dan independen yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk menilai efektivitas dari pelaksanaan penjaminan mutu internal. Sedangkan Nanang Fattah, menjelaskan bahwa, audit

⁶⁵ Kementerian Agama, CORDOVA Al-Qur'an & Terjemah, (Bandung: Syaamil Quran, 2012), 326.

mutu adalah salah satu kegiatan pengukuran ketercapaian standar mutu pada satuan pendidikan. Alat yang digunakan untuk mengukur ketercapaian standar mutu pada satuan pendidikan adalah menggunakan instrumen evaluasi diri sekolah. Setiap satuan pendidikan melakukan penjarangan data dengan cara mengisi instrumen EDS.

Luaran dari kegiatan audit mutu adalah laporan pelaksanaan pemenuhan SNP dan pelaksanaan rencana pemenuhan mutu oleh satuan pendidikan. Selain itu dirumuskan rekomendasi tindakan perbaikan jika ditemukan adanya penyimpangan dari rencana dalam pelaksanaan pemenuhan mutu. Dengan demikian, ada jaminan kepastian terjadinya peningkatan mutu secara berkelanjutan.⁶⁶ Audit mutu juga dilakukan untuk melihat keterlaksanaan program yang telah ditetapkan dengan menetapkan auditor sesuai dengan bidang tugasnya. Hasil audit mutu dilaporkan kepada kepala sekolah atau disampaikan pada saat rapat manajemen sekolah. Dari audit mutu akan ditemukan permasalahan yang dihadapi oleh lembaga yang kemudian dirumuskan rekomendasi perbaikannya.⁶⁷

Hedrig dan Polla menjelaskan bahwa penjaminan mutu merupakan kegiatan rutin yang berkesinambungan dan harus dilaksanakan terus menerus dan bukan bersifat ad hoc. Oleh karena itu, proses audit mutu internal perlu diterapkan secara terus menerus dengan penekanan bahwa kegiatan ini bukan mencari kesalahan melainkan untuk melakukan tindakan perbaikan bagi pendidikan. sistem penjaminan mutu internal akan menghasilkan lulusan yang baik, kreatif, inovatif

⁶⁶ Nanang , Fattah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, 28.

⁶⁷ Rohmad Shodiq, *Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan di SMK Negeri 1 Magelang*, Skripsi, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, 2017

dan mampu menciptakan lapangan kerja dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki dari lembaga pendidikan yang bermutu.⁶⁸

Pelaksanaan audit mutu harus dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disepakati bersama auditi. Auditor perlu membuat daftar pengecekan (checklist audit) yang berisi pertanyaan untuk menemukan fakta. Lingkup audit dapat meliputi 8 standar nasional pendidikan yang meliputi: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar penilaian, standar pengelolaan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana dan standar pembiayaan.⁶⁹ Delapan standar tersebut merupakan pedoman bagi auditor untuk melakukan sistem penjaminan mutu internal.

Audit mutu internal dilakukan oleh auditor internal dari struktur tim penjaminan mutu internal, dalam upaya menentukan tingkat kesesuaian terhadap persyaratan sistem manajemen organisasi sehingga dapat dilakukan kegiatan perbaikan.⁷⁰ Pelaksanaan audit mutu adalah mendorong terjadinya perubahan-perubahan untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi secara keseluruhan sejalan dengan strategi bisnis yang telah dipilih dalam rangka merealisasikan visi-misi lembaga. Secara lebih spesifik tujuan audit mutu internal dapat diuraikan sebagai berikut⁷¹:

1. Memberikan umpan balik tentang kinerja organisasi.

⁶⁸ Ahmad Sulaiman & Udik Budi Wibowo. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan di Universitas Gadjra Mada, *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, Vol.4, No. 1, April 2016, 17-32.

⁶⁹ Nanang Fattah, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*, 197-198.

⁷⁰ Ridwan Abdullah Sani, dkk. *Penjaminan Mutu Sekolah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), 165.

⁷¹ Petunjuk pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan oleh satuan pendidikan, 99.

2. Mengarahkan pencapaian tujuan.
3. Memberikan sense of urgency.
4. Menemukan peluang perbaikan.
5. Memastikan apakah sistem diterapkan secara efektif.
6. Memastikan pelaksanaan mutu terpelihara secara terus menerus.
7. Mendeteksi penyimpangan-penyimpangan terhadap kebijakan mutu sedini mungkin.⁷²

Dalam melaksanakan audit mutu, maka diperlukan penanganan yang tepat agar pengelolaan audit dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun aspek-aspek yang perlu diaudit dalam bidang pendidikan dasar dan menengah sebagai berikut⁷³ :

1. Mutu lulusan
2. Mutu pendidik dan tenaga kependidikan
3. Mutu kurikulum dan perangkat pembelajaran
4. Mutu proses pembelajaran
5. Mutu penilaian pembelajaran
6. Mutu layanan pendukung pembelajaran
7. Mutu pembiayaan mutu pengelolaan sekolah atau manajemen pendidikan

⁷² Iskandar Indranata, Terampil dan Sukses Melakukan Audit Mutu Internal, 31-32.

⁷³ Ridwan Abdullah Sani, dkk. *Penjaminan Mutu Sekolah*, 166.

Pelaksanaan audit mutu internal harus sesuai dengan karakteristik audit mutu yang mencakup beberapa aspek sebagai berikut⁷⁴ :

1. Bersifat objektif untuk menentukan tingkat pemenuhan kriteria audit
2. Berdasarkan masalah yang ada
3. Dapat mengukur tujuan yang ingin dicapai
4. Bersifat periodik agar dapat memastikan bahwa tujuan yang direncanakan telah tercapai
5. Melibatkan seluruh pemangku kepentingan
6. Dilakukan secara sistematis, mandiri dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit

Adapun pelaksanaan audit mutu dapat dilakukan dengan cara pertama melalui wawancara, kedua pemeriksaan dokumen, ketiga pemeriksaan produk, keempat pengamatan terhadap aktivitas (observasi lapangan), kelima pengamatan terhadap kondisi. Dari beberapa kegiatan audit mutu yang lebih dominan dilakukan yakni melalui observasi.⁷⁵

G. Penelitian Terdahulu

Sejauh penelusuran peneliti terhadap berbagai sumber pustaka, belum ditemukan hasil penelitian yang fokus pembahasan tentang manajemen sistem penjaminan mutu internal di SMP Terpadu Ar-Risalah Lirboyo kota Kediri Jawa

⁷⁴ *Ibid*, 100.

⁷⁵ Ridwan Abdullah Sani, dkk. *Penjaminan Mutu Sekolah*, 169.

Timur. Dari beberapa penelusuran pustaka yang penulis lakukan ada beberapa pustaka yang telah membahas Manajemen sistem penjaminan mutu dalam meningkatkan mutu pendidikan diantaranya:

Pertama, penelitian tesis yang berjudul Manajemen Pengembangan Mutu Lembaga Pendidikan (Studi Kasus Pusat Pengembangan Bahasa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) ditulis oleh Rahmad Fitriyanto, Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga tahun 2016. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen mutu di Pusat Pengembangan Bahasa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang meliputi pelaksanaan visi dan misi, proses dan evaluasi kegiatan berjalan dengan baik sesuai dengan manajemen lembaga pendidikan. Dalam implementasi tersebut dilakukan analisis SWOT untuk menjelaskan faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan manajemen mutu tersebut.⁷⁶

Kedua, jurnal ilmiah yang berjudul Sistem penjaminan mutu pendidikan di madrasah studi deskriptif pada MI Istiqomah Samba Purbalingga yang ditulis oleh Munjin, dosen tetap STAIN Purwokerto. Dalam jurnal tersebut dijelaskan mengenai tahapan persiapan manajemen mutu di MI Sambas melalui tahap perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, pembinaan dan evaluasi. dan ini dilakukakan secara *bottom up*. Untuk mendukung kinerja yang optimal dibuatlah job deskripsi yang jelas pada masing-masing jabatan yang ada.

Layanan pendidikan yang diberikan berfokus pada *process oriented*. Formasi

⁷⁶ Rahmad Fitriyanto, "Manajemen Pengembangan Mutu Lembaga Pendidikan (Studi Kasus Pusat Pengembangan Bahasa UIN Sunan Kalijaga) "Tesis.(Yogyakarta: Fakultas Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016), Xi

jabatan lebih mengedepankan kinerja ketimbang senioritas. Kesejahteraan yang diberikan kepada tenaga pendidik dan kependidikan mengacu pada sistem penggajian PNS. Prestasi yang diperoleh adalah juara II Sekolah sehat. Juara III nasional Sekolah Bermutu, sertifikat ISO 9001: 2008 tentang manajemen, piagam penghargaan dari Kemenag sebagai Lembaga Pendidikan Bermutu.⁷⁷

Ketiga, jurnal ilmiah ditulis oleh Suratno.⁷⁸ Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa manajemen dalam perencanaan sistem penjaminan mutu internal sekolah di SMA 1 Yogyakarta yang meliputi 1) penetapan standar mutu, analisis data mutu, menyusun perencanaan mutu, dan penetapan SOP. 2) Pengorganisasian sistem penjaminan mutu internal sekolah di SMA Negeri 1 Yogyakarta dilakukan dengan sekolah membuat surat keputusan Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah, yang dilengkapi dengan *job description* masing-masing bagian; 3) Pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal sekolah berjalan dengan baik dan lancar. Penggerakan sistem penjaminan mutu internal dimulai dengan melakukan analisis SKL, standar isi, standar proses, menelaah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan dilanjutkan pengamatan pelaksanaan pembelajaran di kelas); dan 4) Evaluasi sistem penjaminan mutu internal sekolah dilakukan dengan diskusi atau sharing antara hasil pengamatan dari Tim dan guru yang diamati, baik bersifat individual maupun kelompok untuk disesuaikan dengan standar operasional system yang telah ditetapkan

⁷⁷ Munjin “sistem penjaminan mutu pendidikan di Madrasah studi deskriptif pada MI Istiqomah Sambas Purbalingga”, dalam *Komunika Jurnal dakwah Stain Purwokerto*, Vol. 7 No. 2 Juli-Desember 2018.

⁷⁸ Suratno. “Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah dalam Upaya Pengembangan Program Akademik Unggulan di SMAN 01 Yogyakarta ”, *Jurnal Media Manajemen Pendidikan*, Vol 1, No. 2, Oktober 2018, 217.

Keempat, jurnal ilmiah yang ditulis oleh Solikhudin dalam jurnal *Ar-Rihlah Inovasi Pengembangan Pendidikan dan Islam*. Dalam jurnal tersebut dijelaskan mengenai pentingnya sistem pejaminan mutu internal dalam lembaga pendidikan, bahwa di tengah persaingan global sekolah dituntut mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghajatkan diri kepada sains dan teknologi.⁷⁹ Pemenuhan kebutuhan masyarakat dan kepuasan masyarakat terhadap lulusan pendidikan merupakan sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar agar lulusan pendidikan sekolah dipandang baik dan memiliki nilai daya saing. Oleh karena itu penerapan manajemen sistem penjaminan mutu internal merupakan solusi untuk memastikan dan memberikan jaminan, bahwa pendidikan di suatu sekolah dengan segala perubahan merupakan pendidikan yang bermutu dan eksis ditengah perubahan dan perkembangan zaman.

Kelima, jurnal ilmiah yang berjudul *Sistem Penjaminan Mutu Internal Madrasah antara Teori dan Praktik* yang ditulis oleh Muhyar Fanani, Dosen Pascasarjana UIN Walisongo sekaligus Kepala Pusat Penjaminan Mutu Akademik (PPMA) UIN Walisongo.⁸⁰ Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa Sistem penjaminan Mutu digunakan sebagai upaya sistematis untuk meningkatkan mutu berkelanjutan sehingga bisa mencegah kesalahan yang tidak perlu, bentuk dari peningkatan mutu berkelanjutan madrasah perlu menerapkan model Deming yang terdiri dari siklus *plan, do, check* dan *act*. Apabila madrasah yang memiliki banyak

⁷⁹ Sholikudin “Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan di SMK Negeri 02 Kebumen”, dalam *Jurnal Ar-Rihlah Inovasi Pengembangan Pendidikan Islam*, Vol. 14, No.2, 2019, 115.

⁸⁰ Muhyar Fanani, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Madrasah antara Teori dan Praktik”, dalam *Jurnal at-Taqaddum*, Vol. 3, No.2, November 2011, 267.

keterbatasan, PDCA dijalankan dengan mengikuti model Joseph Juran yakni Kaizen (*step by step improvement*) dan memilih langkah yang murah.

Berikut adalah Tabel tentang posisi peneliti dari peneliti terdahulu

No	Nama dan tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas penelitian
1.	Rahmad Fitriyanto, 2016.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen peningkatan mutu 2. Pengumpulan data dan teknik analisis data 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis peneliti berupa jurnal 2. Mengungkap faktor pendukung dan penghambat serta solusinya 3. Mengungkap peningkatan mutu pada pusat pengembangan bahasa. 	Mendeskriskan dan menganalisis manajemen penjaminan mutu yang dilakukan oleh SMP Terpadu Ar-Risalah Lirboyo yang sudah terbukti diterima di masyarakat, dan duni pendidikan nasional dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi kasus.
2.	Munjin, 2018.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi peningkatan mutu 2. Pengumpulan data dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendiskripsikan peningkatan mutu di madrasah secara buttom up. 2. Berfokus pada focus oriented. 3. Penelitian jurnal. 	
3.	Suratno, 2018.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen system penjaminan mutu internal di sekoah 2. Membuat TPMPS pada pelaksanaan SPMI di sekolah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendiskripsikan dan menganalisis perencanaan mutu brdasarkan SKL, standar isi, dan RPP. 2. Penelitian jurnal 3. Subjek penelitian yang digunakan adalah kepala sekolah. 	
4.	Solikhuddin, 2019.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi peningkatan kualitas beserta pentingnya SPMI di dunia pendidikan. 2. Penelitian kualitatif. 3. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengungkapkan strategi peninkaan mutu berdasarkan factor penghambat dan pendukung. 2. Penelitian jurnal. 3. Mengungkapkan peninhkatan mutu secara umum pada dunia pendidikan. 	
5.	Muhyar fanani, 2011.	<ol style="list-style-type: none"> 1. PDCA yang dijalankan mengikuti 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas penjaminan mutu 	

		model Joseph Juran. 2. Mengkaji dan menganalisis SPMI di sekolah tingkat dasar.	berdasarkan teori dan realita. 2. Berupa jurnal ilmiah. 3. Lokasi penelitian di tingkat madrasah ibtdaiyyah.	
--	--	--	--	--

H. Paradigma Penelitian

